

DAMPAK KENAIKAN HARGA BBM DAN PENANGANAN PENGAMANANNYA

Oleh : Kombes Pol. Drs. Runadi Ma'mun

Mengelola Indonesia sama sekali bukan pekerjaan mudah, menjadi Presiden bukanlah sebuah tanggung jawab sederhana. Lonjakan harga minyak internasional telah berlangsung beberapa kali mulai dari 37 dollar AS perbarrel menjadi 53 dollar AS per barrel, tahun berikutnya pemerintah berhadapan dengan lonjakan harga minyak dari 53 dollar AS per barrel menjadi 64 dollar AS per barrel dan tahun berikutnya lagi minyak melonjak lagi dari 64 dollar AS per barrel menjadi 72 dollar AS per barrel.

Harga minyak itu menjadi bola liar yang semakin liar tahun 2008, angka 100 dollar AS per barrel sudah terlampaui, bahkan pada 23 Mei 2008 harga minyak tembus 135,09 dollar AS per barrel, sehingga pemerintah dengan adanya kenaikan minyak internasional tersebut telah tiga kali mengambil langkah penarikan subsidi BBM, sehingga menimbulkan berbagai dampak dari penarikan subsidi BBM tersebut.

Setiap ada kenaikan BBM yang paling menerima dampak kenaikan BBM adalah Kepolisian, sejak masih berupa isu Polisi telah terjepit, tetapi pada saat yang sama harus berdiri diantara pihak yang pro dan kontra, dipihak lain Kepolisian juga sulit meninggalkan perannya selaku alat Negara, yaitu mengamankan kebijakan pemerintah saat harga BBM naik.

Dalam upaya megantisipasi kenaikan BBM Polri telah mengambil langkah-langkah polisionil dari dampak yang mungkin terjadi dan kerawanan Kamtibmas

seperti terjadinya aksi unjuk rasa baik yang dilakukan oleh masyarakat, mahasiswa, buruh, nelayan maupun elemen masyarakat lainnya, timbulnya antrian pembelian BBM di SPBU, penimbunan, pengoplosan dan penyeludupan BBM, terjadinya konflik antar elemen masyarakat yang pro dan kontra atas kenaikan BBM, serta kenaikan harga bahan pokok.

Upaya pemerintah sebelum mengambil keputusan untuk menaikkan harga BBM telah melakukan tahapan-tahapan penghematan dengan jalan memangkas anggaran Departemen, penghematan penggunaan BBM, listrik dan air, perubahan bahan minyak tanah untuk beralih menggunakan gas di beberapa kota besar, penghematan di BUMN PLN dan Pertamina, pengurangan biaya perjalanan

baik keluar negeri maupun dalam negeri, serta upaya pemasukan pajak, menghimbau asosiasi perusahaan agar tidak melaksanakan pemberhentian karyawan.

Kebijakan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan harga BBM pada tanggal 24 Mei 2008, yakni Premium mengalami kenaikan 33,33% (Rp. 1.500) dari Rp. 4.500,- menjadi Rp. 6.000,- per liter, Solar naik Rp. 1.200,- (27,90%) dari Rp. 4.300,- menjadi Rp. 5.500,- per liter serta minyak tanah naik Rp. 500 (25%) dari harga Rp. 2.000,- menjadi Rp. 2.500,- per liter.

Kenaikan harga BBM dampaknya memicu harga-harga bahan pokok, dibidang transportasi berlomba menaikkan tarif angkutan umum baik darat, udara, maupun laut, unjuk rasa di beberapa kota



Para pengunjung rasa mendapat penjagaan dari petugas Polri

besar, pemogokan karyawan, sopir penumpang umum dan para nelayan tidak melaut.

Apabila pemerintah tidak menaikkan harga BBM, dipastikan akibat melonjaknya harga minyak di pasar internasional, defisit anggaran (APBN) bisa mencapai angka ratusan triliun, dana dari penghematan subsidi akan disalurkan lewat Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin, jika negara tidak mampu menanggung beban subsidi BBM, semakin besar subsidi BBM semakin besar ketidakadilan dimasyarakat, berdasarkan perhitungan 80% subsidi BBM dinikmati orang mampu yang memakai Premium dan Solar untuk kendaraan pribadinya.

Saat ini yang menjadi tantangan adalah upaya menekan konsumsi BBM bersubsidi bisa dikurangi, penggunaan BBM kendaraan pribadi supaya dialihkan dari premium yang bersubsidi menjadi menggunakan Pertamina atau BBM yang tidak bersubsidi.

Polri memandang perlu untuk mengintensifkan pengamanan kenaikan BBM dengan Operasi "Dian 2008" dengan tujuan, menyelamatkan dan menjaga distribusi BBM agar lancar ke obyek-obyek sasaran pengiriman dalam keadaan tepat waktu, kuantitas dan sarannya.

Operasi "Dian 2008" yang digelar sejak bulan April 2008 dilakukan 17 Kepolisian Negara RI Daerah (Polda) diantaranya Polda Metro Jaya, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, NTB, Kaltim, Kalsel, Sulsel, Sumsel, Lampung, Sumut, Sumbar dan Riau.

Hasil yang dicapai dalam operasi "Dian 2008" sedikitnya 277 kasus penimbunan dan pengoplosan dan barang bukti yang berhasil diamankan aparat Kepolisian adalah 138,7 ton Premium, 669,2 ton Solar, minyak tanah 424,7 ton, 44 mobil roda empat, 43 mobil kendaraan roda 6, 2 unit bus dan 10 unit kapal pengangkut BBM, 453 tersangka mereka diduga menimbun BBM untuk dijual setelah harga BBM naik dengan modus operandi yaitu mengoplos dan menimbun yang akan dijual dengan harga yang relatif tinggi, semua tersangka

akan diancam dengan Pasal 53 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Selain Operasi Kepolisian dilaksanakan, Kepolisian melakukan kegiatan razia dalam upaya menjaga keamanan dan menciptakan situasi yang tetap kondusif berupa monitoring dan melakukan penyelidikan atas keresahan masyarakat akibat kenaikan BBM, menghimbau dan mengarahkan unjuk rasa agar berlangsung tertib dan tidak anarkis, melaksanakan penjagaan dan pengawasan pada pusat-pusat SPBU, melakukan tindakan terhadap kelompok atau perorangan yang berspekulasi dengan harga BBM, hal ini dilakukan sesuai Instruksi Presiden kepada Polri dan TNI agar dalam melakukan pengamanan mengedepankan cara-cara damai, persuasif dan bertindak profesional.

Usaha Polri dalam upaya mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM telah melaksanakan "Operasi Dian 2008" sebelum ada kenaikan harga BBM dan meningkatkan kewaspadaan melalui kegiatan rutin namun dampak kenaikan BBM memicu unjuk rasa berbagai lapisan masyarakat dan sejumlah Papol bereaksi terus atas keputusan Presiden menaikkan harga BBM.

Setiap pemerintah menaikkan harga BBM, terjadi debat publik yang seru dan tidak jarang membuat konflik fisik antara "rakyat" dalam hal ini personifikasinya diwakili mahasiswa dan pemerintah yang sosoknya hadir sebagai "Polisi".

Tindakan represif oleh Polisi dikampus Universitas Nasional (24/5) di Pejaten Pasar Minggu Jakarta Selatan, seakan-akan kedua simbol diatas berhadapan sebagai pemegang mandat yang sah terhadap posisi masing-masing baik yang menolak maupun yang mengamankan kebijakan kenaikan harga BBM.

Ditinjau dari segi kebijakan, Polisi sesungguhnya tidak terkait dengan pengambilan keputusan kenaikan BBM, sebagai bagian dari Pemerintah Polri harus terlibat dalam penerapan kebijakan tersebut, dengan konsekuensi Polisi menjadi sasaran langsung kemarahan

mahasiswa yang menolak kebijakan Pemerintah.

Secara personal anggota Polri terkena dampak negatif kebijakan kenaikan BBM, tanpa dapat dilakukannya Polisi dalam keadaan situasi konflik dalam situasi mendesak secara otomatis Polisi akan menggunakan kewenangan diskresinya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Jenderal Polisi Drs. Sutanto mengatakan "Tidak benar jika dikatakan demikian, Polisi harus bertindak. Jika keamanan warga akan terancam. Itu lokasi pemukiman yang padat kami juga harus melindungi HAM masyarakat".

Keberadaan dilema bertindak atau tidak bertindak yang tampaknya menjadikan pekerjaan Kepolisian berbeda dengan militer, padahal militer atau pejabat publik pada umumnya, Kepolisian sudah dibungkus untuk tidak melakukan pembiaran atau keputusan untuk tidak bereaksi, mengingat hal ini akan menempatkan Kepolisian sebagai pelanggar HAM.

Dalam rangka penyaluran BLT, untuk menghindari gangguan Kamtibmas Polri, TNI dan Satpol Pamongpraja melakukan penjagaan Kantor Pos yang akan menyalurkan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT), aparat keamanan berjaga-jaga di Kantor Pos sejak pagi bersama petugas Kantor Pos, pembagian BLT diatur agar berjalan aman, tertib dan lancar, setiap pemegang Kartu BLT diperiksa identitas dan keaslian kartunya sebelum dana Rp. 300.000,- dicairkan.

Polri sebagai alat Negara yang memiliki kewenangan hukum terbesar pemeliharaan keamanan dalam negeri, Polri dalam menghadapi situasi yang tidak menentu Polisi berusaha memperkuat diri, salah satunya melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, agar dapat tampil profesional, bermoral dan modern. ***

SINDIKAT NARKOTIKA INTERNASIONAL YANG DIKENDALIKAN DARI LAOS, TERTANGKAP !

“ Adalah seorang wanita Winanti alias Noni (baru berusia 24 tahun) tertangkap tangan di pelabuhan Belawan-Medan Sumatra Utara, karena kedapatan membawa Heroin seberat 3,322 Kg. Ternyata wanita tersebut merupakan “mata rantai jaringan pengedar Narkotika Internasional”. Karena telah dikendalikan oleh Jaringan yang berpusat di Laos”.

Berangkat dari Jakarta menuju Bangkok dan tiba disana, transit sebentar dan malamnya terbang lagi menuju Laos. Setibanya di Laos menginap dua malam. Sore harinya berangkat kembali ke Bangkok dengan menggunakan bus, tiba pada pagi hari sekitar pkl. 05.00 di Bangkok. Kembali menginap 1 malam di kota Hatai tak jauh dari Bangkok. Dan selanjutnya dari Bangkok kembali melakukan perjalanan darat dengan tujuan Malaysia, menginap 1 malam, kemudian dengan melalui Pulau Penang Malaysia dengan menggunakan kapal ferry, menyeberang lagi menuju pelabuhan

Belawan Medan Sumatera Utara. Setibanya di pelabuhan Belawan pada sore hari, NONI turun dari tangga kapal dengan melewati alat khusus bea cukai, maka ia tak berkedip tertangkap tangan membawa barang haram Heroin dalam kopernya. Langsung ditangani oleh Dit. Narkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Kombes Pol.Drs.Anjan

Pramuka, demikian kelihaiannya seorang Noni untuk berusaha membawa barang haram heroin dari Laos ke Medan untuk selanjutnya akan dibawa ke Jakarta. Dalam pengembangan penyelidikan, maka dengan bantuan dari Tim Direktorat IV/TP Narkoba & KT, diadakanlah pengeledahan di tempat kost tersangka NONI di bilangan Meruya Jakarta Barat, dan ditemukan foto tersangka lain pria asal Nigeria menurut hasil penyelidikan, telah meninggalkan tempat tersebut segera setelah mengetahui bahwa tersangka utama NONI tertangkap di Belawan Medan.

Hasil pengembangan penyelidikan selanjutnya ternyata kasus ini juga berkaitan dengan seorang Napi (kasus narkoba) WN Nigeria, di LP Banceuy Bandung. Maka dengan koordinasi Polda Jabar, dilakukanlah pengeledahan di LP Banceuy dan ditemukan 2 HP dengan beberapa sim card, serta buku dan ATM BCA atas nama Atun (warga Bandung). Lagi-lagi narapidana WN Nigeria



Rekonstruksi penyampuran bahan narkotika

tersebut terlibat kasus narkotika tahun 2002 di Polda Metro Jaya dengan ancaman hukuman seumur hidup.

Menurut pengakuan bahwa heroin itu adalah pesanan miliknya, yang diambilkan Noni ke Laos dengan cara membelinya dari seseorang bernama Mr.Frank. Adapun dananya, didapat dari patungan tiga orang Napi, yaitu 2 orang Napi di Banceuy Bandung, dan seorang lagi Napi di Cipinang Jakarta. Selama perjalanan dari Laos menuju Belawan, tersangka Noni selalu dikendalikan melalui HP oleh sang Napi di Banceuy Bandung dan DPO lainnya.

Selanjutnya penyelidikan diarahkan kepada sdr. Atun yang notabene adalah pacar dari seorang Napi (WN Nigeria) di LP. Banceuy Bandung. Dan yang bersangkutan ternyata mempunyai lima buku tabungan di Bank-bank Nasional, adapun keterlibatannya dengan sang Napi tersebut adalah sebatas pacar, dan “hanya bermaksud membantu membuat rekening Bank atas namanya untuk membantu sang pacar yang akan membuka usaha dibidang garmen/tekstil”, begitu jelasnya. Setelah membuka rekening dengan ATM, maka semuanya diserahkan kepada pacarnya tersebut. ***(rz)



Gudang penyimpanan bahan narkotika

LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI MERUPAKAN KAWAH CANDRADIMUKA BAGI CALON ANGGOTA POLRI

Cedera akibat kecelakaan lalu lintas selalu menimbulkan resiko kecacatan bahkan kematian, pemahaman dan ketrampilan dalam menangani korban kecelakaan lalu lintas mutlak harus dimiliki oleh setiap petugas Laka Lantas. Dengan tingkat pemahaman dan ketrampilan yang cukup memadai terhadap tindakan pertama darurat korban kecelakaan lalu lintas diharapkan akan mampu membantu upaya menurunkan angka cacat maupun kasus kematian korban kecelakaan lalu lintas, demikian sambutan Kababinkam Polri pada acara Pelatihan olah TKP dan penanganan pertama darurat korban laka lantas tahun 2008 bertempat di Pusdik Lantas Polri Serpong Jawa Barat.

Pelatihan yang dilaksanakan selama 10 hari adalah dalam rangka memberikan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman bagi anggota Kepolisian khususnya Polisi Lalu lintas dalam melakukan pengolahan TKP dan tindakan pertama darurat korban kecelakaan lalu lintas. Kemampuan pengolahan TKP sebagaimana dimaksud diatas adalah kemampuan untuk dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan laka lantas yang merupakan satu bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat dalam rangka menerapkan supremasi hukum. Sedikitnya terdapat enam hal yang selalu harus diperhatikan dalam melakukan penanganan Laka Lantas diantaranya; pengecekan kondisi korban, pengamanan TKP Laka Lantas, evakuasi korban, pemotretan umum Laka Lantas, pembuatan sket kasar TKP dan pengukuran.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa, merubah aspek kultur, adalah lebih rumit dibandingkan dengan dua aspek yang lain, yaitu aspek instrumental dan struktural. Salah satu jalur strategis untuk merubah kultur adalah melalui pendidikan. Perubahan budaya melalui pendidikan, dimaksudkan untuk mengubah perilaku anggota Polri dilapangan, yang selama ini menampilkan citra penguasa, menjadi tampilan citra pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, yang menghormati HAM, sehingga yang diutamakan adalah kesantunan, keramahan dan keberadaban dalam perilaku, serta kemauan untuk bermitra dengan masyarakat, sebagai stakeholders Kamtibmas.

Dalam rangka mendukung upaya perubahan kultur tersebut, pada bidang pendidikan dan latihan, telah dilakukan

pembenahan, antara lain pada pelaksanaan pendidikan, baik dalam proses belajar mengajar, pelaksanaan pelatihan, maupun pola pengasuhan. Hal tersebut diwujudkan melalui perbaikan kurikulum yang berlaku selama ini dari semula kurikulum berbasis tujuan, menjadi kurikulum yang lebih berorientasi kepada profesi Polri, atau sering diistilahkan dengan kurikulum yang lebih berorientasi kepada profesi Polri sebagai pemelihara Kamtibmas, penegak hukum, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang profesional, bermoral dan modern.

Di samping itu, dilakukan pula pembenahan pada pola pengasuhan siswa pada setiap jenis pendidikan, baik menyangkut materi maupun metode, melalui proses pengasuhan yang sesuai dengan semangat reformasi, diharapkan akan terbentuk anggota Polri yang memiliki kepribadian dan perilaku, sebagai insan Bhayangkara, selain itu, guna mewujudkan postur Polisi Sipil yang sesuai dengan harapan masyarakat, maka berbagai mata pelajaran Polisi tugas umum, HAM, Polmas, serta muatan local diberikan.

Kababinkam berharap kepada para siswa untuk:

1. Memahami bahwa, para siswa merupakan putra – putri Indonesia yang terpilih sebagai calon pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta penegak hukum, yang

Dalam rangka mendukung upaya perubahan kultur tersebut, pada bidang pendidikan dan latihan, telah dilakukan pembenahan, antara lain pada pelaksanaan pendidikan, baik dalam proses belajar mengajar, pelaksanaan pelatihan, maupun pola pengasuhan.

Hal tersebut diwujudkan melalui perbaikan kurikulum yang berlaku selama ini dari semula kurikulum berbasis tujuan, menjadi kurikulum yang lebih berorientasi kepada profesi Polri, atau sering diistilahkan dengan kurikulum yang lebih berorientasi kepada profesi Polri sebagai pemelihara Kamtibmas, penegak hukum, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang profesional, bermoral dan modern.

setia pada masyarakat, Bangsa dan Negara.

2. Memahami bahwa, lembaga pendidikan Polri, merupakan kawah candradimuka bagi calon anggota Polri. Untuk itu, para siswa diharuskan mengikuti semua proses pendidikan dengan penuh kesungguhan dan kemauan, baik dalam mengikuti proses belajar mengajar, pelatihan maupun pengasuhan.

3. Memahami bahwa, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan tempat pengabdian kepada masyarakat, yang berpijak pada hukum dan HAM. Kepada para Ka sekolah, Kapusdik, Ka SPN dan Kaskadiklat Poludara, Kababinkam meletakkan para siswa untuk dididik, dilatih dan diasuh, sehingga dapat menjadi insan Bhayangkara yang mahir, terpuji dan patuh hukum. Dengan kemauan dan tekad yang kuat, para perwira akan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab, selaku pendidik, pelatih, dan pengasuh, walaupun dihadapkan dengan keterbatasan yang ada.

Sebelum mengakhiri amanatnya Kababinkam Polri berpesan kepada seluruh personel lembaga pendidikan untuk:

1. Tetap berpegang teguh pada sumpah jabatan, dengan penuh keikhlasan dalam membina, mendidik para siswa dilembaga pendidikan, agar terbentuk menjadi Polisi yang unggul.
2. Beri contoh dan keteladanan yang baik, dalam mendidik kepada seluruh peserta didik, sehingga filosofi pendidikan, yaitu mahir, terpuji, dan patuh hukum, dapat terwujud.
3. Layani para peserta didik dalam menuntun ilmu dan pengetahuan di lembaga pendidikan ini, agar nantinya terampil dalam melayani masyarakat.
4. Kepada para Kapusdik, Ka Sepolwan, Ka SPN dan Kaskadiklat Poludara, agar menguasai manajemen pendidikan, terutama dalam pembuatan rencana tindakan, pengawasan dan pengendalian program serta evaluasi program yang telah direncanakan dan dilaksanakan.
5. Khusus kepada Ka SPN Mojokerto, Ka SPN Purwokerto, dan SPN Singaraja, yang saat ini sedang mendidik 1.500 pemuda Papua dan Papua Barat, agar mempersiapkan pengasuhan dengan sebaik-baiknya, sehingga keberadaan para siswa di sana, dapat mencerminkan eratnya persatuan dan kesatuan bangsa.*** (nats).

Disarikan dari Amanat Kababinkam Polri pada upacara penutupan Pelatihan Olah TKP dan Penanganan Pertama Darurat Korban Laka Lantas Tahun 2008 bertempat di Pusdiklat Ditlantas Serpong Jawa Barat.

PAHAMI DAN HAYATI TRIBRATA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS

Berbagai keberhasilan yang telah ditunjukkan dan membanggakan dalam kinerja Polri dalam tahun 2007 hingga Maret 2008 dan sekaligus secara jujur mengupas secara teliti dan sepeoleh hati berbagai kelemahan dan kekurangan yang terjadi adalah sikap yang berani dan jujur yang selalu harus kita kembangkan. Perbaikan citra harus kita jadikan tantangan bersama dan harus dihadapi dan dipertanggung jawabkan secara bersama dan bukan menjadi tanggung jawab unsur pimpinan semata, tetapi kita harus membangun komitmen untuk menegakkan etika moral sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dan kita harus mengingat kembali nilai-nilai Tri Brata dan Catur Prasetya, demikian antara lain amanat Koorsahli Kapolri pada upacara bulanan bertempat di lapangan upacara Bhayangkara Mabes Polri beberapa waktu yang lalu.

Lebih jauh Koorsahli Kapolri mengatakan untuk membangun komitmen itu kita harus sama-sama berangkat dari satu pemahaman tentang keberadaan Polri, bahwa anggota Polri adalah insan Bhayangkara yang diberi mandat oleh rakyat untuk menjalankan tugas-tugas yang menyangkut masalah-masalah keamanan dan kehidupan yang tertib dimasyarakat. Disini dilekatkan oleh masyarakat brevet kepercayaan kepada Polri untuk menjalankan tugas-tugas penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Secara singkat Polri adalah organ yang dibentuk oleh rakyat dan diberi wewenang oleh rakyat untuk menjalankan amanat rakyat dalam kerangka Negara yang demokratis.

Menyadari pokok pikiran diatas, yang mengandung makna mengungkap dan menelusuri tentang jati diri Polri, maka kita akan menjadi paham segala atribut dan kewenangan yang ada pada setiap anggota Polri adalah pemberian kepercayaan untuk berbuat sesuai ketentuan yang berlaku demi kesejahteraan, keadilan dan kedamaian yang didambakan masyarakat. Oleh karena itu kepercayaan ini harus kita jaga bersama, agar rakyat tetap meletakkan kepercayaan dengan segala atribut dan wewenang itu kepada Polri. Menjaga kepercayaan dengan sebaik-baiknya dan sejujurnya adalah jiwa kesatria dan bagi Polri yang diberi kepercayaan tentu telah

dianggap mampu oleh rakyat. Dengan demikian bila Polri menjalankan kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya akan mendapat dukungan yang luar biasa dari pemberi kuasa yakni rakyat. Oleh karena itu agar kita senantiasa dapat menjaga dan menjalankan kepercayaan itu. Mari kita kembali memahami panduan nilai-nilai semangat insan Bhayangkara yakni Tribrata.

Dengan menggelorakan semangat insan Bhayangkara Polri dapat merubah citra menjadi lebih baik dan yakin pula Polri akan meraih kepercayaan masyarakat. Menggugah dan menggelorakan sifat ingin merubah adalah



langkah awal yang baik. Oleh karena itu dimulai dari masing-masing anggota dari pangkat terendah sampai dengan tertinggi untuk menunjukkan penampilan tugas yang dijiwai Tribrata dan Catur Prasetya. Tampilkan kinerja disemua lini yang profesional, proporsional dan memberi kepuasan kepada pihak yang dilayani.

Media untuk penampilan telah digelar melalui kebijakan pimpinan yang menjadi andalan kita antara lain Polmas yang ingin membangun komunikasi sosial dengan masyarakat berdasarkan kemitraan yang sejati.

Melalui media Polmas kita akan dapat melakukan komunikasi efektif dalam rangka membangun citra. Tentu ini juga bukan suatu hal yang mudah kita laksanakan karena membutuhkan kemampuan komunikasi dan ketauladanan yang memadai disetiap anggota Polri. Bekal ber-Polmas membutuhkan insan Bhayangkara yang benar-benar berperilaku sesuai nilai-nilai Tribrata dengan demikian saja diperlukan suatu gerakan pencerahan untuk memantapkan jiwa Tribrata dan Catur Prasetya sebagai pegangan nilai-nilai dalam pelaksanaan

tugas. Selain itu tentu menjadi kewajiban dari semua unsur pimpinan untuk menempatkan pentingnya pemahaman dan amalan Tribrata yang harus diutamakan sebelum kita menjalankan strategi Polmas. Pemikiran ini mengajak melakukan langkah awal yang dimulai dari membenahi diri selaku insan Bhayangkara sebelum lebih lanjut merealisasikan strategi Polmas.

Setiap insan Bhayangkara berkewajiban untuk menanggalkan budaya lama yang sarat dengan pendekatan represif serta arogansi kekuasaan. Menggantinya dengan budaya baru dengan budaya baru yang lebih humanis. Hal yang harus selalu terpatri dalam benak kita adalah bahwa kita adalah pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Sebagai abdi yang baik tentu kita harus menjunjung dan menghormati masyarakat bukan sebaliknya. Polri tidak menciptakan namun melaksanakan hukum. Polri juga tidak berdiri diatas hukum, namun justru menegakkan hukum. Hanya dengan cara pemahaman seperti ini anggota Polri akan dapat memantapkan kepercayaan masyarakat pada Polri, Polri yang Tribrata bukan slogan belaka yang sekedar selubung semu dalam penampilan Polri, namun benar-benar harus menjadi roh yang menggerakkan seluruh personil Polri untuk berperilaku yang simpatik, yang profesional, proporsional, etis dan tidak arogan menjadi tanggung jawab bersama setiap insan Bhayangkara untuk menjadikan Tribrata sebagai nafas yang mengiringi setiap derap langkah kita.

Dalam mengakhiri amanatnya Koorsahli Kapolri memberikan penekanan-penekanan :

1. Bahwa awal dari kehendak melaksanakan tugas dengan baik, adalah pemahaman dan penghayatan Tribrata.
2. Bahwa sebagai ksatria kita harus senantiasa berani mengoreksi dan mengaku adanya kelemahan dan selalu bertekad untuk memperbaiki.
3. Sebagai himbuan mulailah dari diri sendiri bagi setiap anggota Polri dan PNS dari tingkat tertinggi sampai dengan terendah untuk membulatkan tekad dan memupuk semangat kebersamaan dalam menyongsong masa dengan yang lebih baik.*** (nats).

Disarikan dari amanat Koorsahli Kapolri pada upacara bulanan bertempat di lapangan upacara Bhayangkara Mabes Polri Jakarta,

IOM MENANDATANGANI MoU BARU DENGAN POLRI

“Penandatanganan MoU ini adalah perwujudan dari komitmen Polri untuk menjadi Polisi Sipil menjunjung HAM dan memperlakukan masyarakat sebagai mitra yang sejajar,” ungkap Wakapolri Komjen Pol. Makbul Padmanegara. Sehubungan dengan suksesnya implementasi bagian pertama dari proyek “Memperkuat Kepolisian Republik Indonesia melalui Pembangunan institusi – tahap II,” IOM dan Polri memperbaharui nota kesepahaman MoU untuk memperpanjang kerjasama, melalui penandatanganan MoU, yang diselenggarakan pada tanggal 31 Januari 2008.

Setelah kerjasama yang sukses selama empat tahun, Kepala Misi IOM Indonesia Steve Cook mengakui bahwa kepemilikan dari proyek ini secara efektif telah berpindah ke tangan Polri. “Di bawah pimpinan Kapolri Jenderal Sutanto, momentum yang diperlukan telah tercapai dan ini memanggil untuk percepatan akselerasi Perpolisian Masyarakat (Polmas) di seluruh Indonesia,” ungkap Steve Cook.

Dengan dana dari Kedutaan Belanda, Proyek “Memperkuat Kepolisian Republik Indonesia melalui Pembangunan Institusi” dimulai pada tahun 2004 dengan tujuan membantu Polri dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip Polmas dan standar internasional HAM ke dalam kebijakan-kebijakan dan praktik operasional Polisi. Cakupan geografis dari proyek ini meliputi Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Jakarta Pusat, Bali, dan sejak Agustus 2006, Nanggroe Aceh Darussalam.

Sampai saat ini, IOM telah memfasilitasi pelatihan Polmas dan HAM lebih dari 12,000 petugas Polisi di daerah-daerah tersebut. Melalui kerjasama IOM dengan Lemdiklat Polri, IOM juga telah memfasilitasi integrasi prinsip-prinsip Polmas dan HAM kepada kurikulum seluruh institusi pendidikan Polri. Sebagai hasilnya, Polri sekarang dapat melakukan pelatihan Polmas dan HAM secara Mandiri. Sekitar 100,000 petugas Polisi di berbagai pelosok Indonesia juga telah menerima dari pelatihan sebagai bagian kerja sama ini, karena mereka dilatih oleh petugas Polisi yang sudah dilatih Polmas

dan HAM. Menurut perkiraan, kelanjutan dari proyek ini akan membuat kurang lebih 50% dari seluruh Polisi di Indonesia sudah dilatih pada tahun 2009.

Walaupun IOM tetap mempertahankan komitmennya untuk mengorganisasi pelatihan bagi petugas lapangan Polri, IOM dan pimpinan senior Polisi telah setuju untuk memberikan penekanan terhadap peningkatan kemampuan manajemen Polisi untuk memastikan berkembangnya institusionalisasi Perpolisian Masyarakat. Ini selanjutnya akan memastikan terjadinya perpindahan kepemilikan model Perpolisian Masyarakat yang efektif pada saat proyek ini berakhir. Sebagai strategi reformasi, Polmas memberikan penekanan pada pembangunan kemitraan dengan masyarakat sebagai sarana pemecahan masalah kejahatan. Polmas adalah pendekatan humanis yang didasarkan pada penghormatan terhadap HAM, akuntabilitas, dan kebutuhan melaksanakan tugas Polisi dengan membangun kemitraan dengan masyarakat. “Sesuai dengan tuntutan masyarakat terhadap Polisi, Polri harus menjadi institusi Polisi yang demokratis, akuntabel dan profesional,” ungkap Jenderal Makbul Padmanegara. “Pihak Polri, juga Pemerintah Indonesia, sangat berterima kasih atas bantuan finansial dan teknis yang telah diberikan IOM dan Kedutaan Kerajaan Belanda selama beberapa tahun ini. Saya sangat optimis bahwa MoU ini akan memberikan kontribusi yang besar kepada upaya dan saya berharap kerja sama ini akan terus dapat ditingkatkan”..***

TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU LEGISLATIF 2009

Penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2009 dimulai tanggal 5 April 2008 sampai dengan 1 Oktober 2009 dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pemutakhiran data Pemilu atau penyusunan daftar pemilih (5 April 2008 s/d 20 Oktober 2008).
2. Pendaftaran peserta pemilu dan penetapan peserta Pemilu (5 April s/d 27 Oktober 2008)
3. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (1 Mei s/d 12 Juni 2008).
4. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab./Kota (6 Juli s/d 27 Oktober 2008).
5. Masa kampanye (8 Juli s/d 1 April 2009)
6. Masa tenang (2 April s/d 4 April 2009)
7. Pemungutan dan penghitungan suara (5 April 2009)
8. Penetapan hasil Pemilu (15 April s/d 5 Mei 2009).
9. Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD Prov. dan DPRD Kab/kota (Juli s/d 1 Oktober 2009).

5. UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif.
6. Rencana Operasi Mantap Brata XII 2008.
7. Peraturan KPU No. 9 Tahun 2008 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Legislatif.

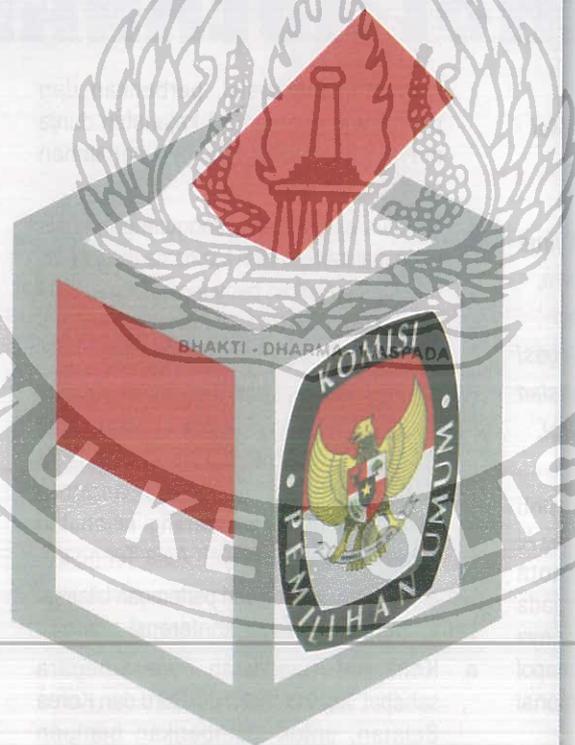
Pada tahapan pemilu tersebut dimungkinkan terjadi tindak pidana Pemilu pasal 260 s/d pasal 311 UU No. 10 tahun 2008. Disamping tindak pidana Pemilu tersebut di atas dimungkinkan pula terjadi tindak pidana lain diluar UU No. 10 tahun 2008 antara lain:

1. KUHP Pasal 160, 161, 162, 164, 167, 168, 170, 362, 363, 365, 351, 359, 360, 338, 406, 408, 409, 410, 187, 188, 193, 200, 207.
2. Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Tipikor, UU No. 15 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Penyidikan tindak pidana Pemilu dilaksanakan berdasarkan laporan Bawaslu/Panwaslu dan khusus dugaan pelanggaran Pasal 263 KUHP, KPU langsung menyampaikan laporan kepada Polri.

Penyidikan tindak pidana tersebut tidak perlu menunggu laporan Bawaslu /Panwaslu dengan menggunakan prosedur sesuai Undang-Undang No. 8 tahun 1981, tindakan penyidikan terhadap pejabat negara agar tetap mempedomani Undang-Undang No. 22 tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR dan DPRD serta Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.***

**SUKSES PEMILU 2009
SUKSES BANGSA**



**2009
PEMILIHAN UMUM**

Dasar Hukum Pemilu Legislatif tahun 2009 sebagai berikut :

1. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. UU No. 22 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pemilu.
4. UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.



KONFERENSI ASEANAPOL KE-28

Konferensi Aseanapol ke-28 telah dilaksanakan pada tanggal 25 s/d. 29 Mei 2008 di Bandar Seri Begawan dengan dihadiri oleh delegasi dari sepuluh Kepolisian Negara anggota Aseanapol, lima delegasi kepolisian Negara mitra wicara, serta perwakilan sekretariat Asean dan ICPO-Interpol. Pada kesempatan ini Delegasi Polri dipimpin oleh, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komjen Pol. Drs. R. Makbul Padmanagara.

Konferensi secara resmi dibuka oleh Inspector General of Police Pangeran Haji Al Muhtadee Billah, Pangeran Mahkota Kesultanan Brunei dan Menteri Senior pada kantor Perdana Menteri. Dalam sambutannya beliau menegaskan "posisi penting Aseanapol dalam rangka menjaga keamanan regional Asia Tenggara".

Beberapa hasil penting dari konferensi Aseanapol ke-28 adalah :

a. Seluruh anggota Aseanapol akan meningkatkan kerja sama di dalam pemberantasan kejahatan lintas Negara, yang telah disepakati dalam joint communiqué meliputi perdagangan gelap narkoba, terorisme, penyeludupan senjata, perdagangan manusia, maritime fraud,

kejahatan komersial, perbankan dan pemalsuan kartu kredit, kejahatan dunia maya, pemalsuan dokumen perjalanan serta transnational fraud.

- b. Khusus di dalam penanggulangan krisis yang diakibatkan oleh terorisme disepakati, untuk melanjutkan penyusunan Aseanapol Communication and Coordination Protocol on Crisis Management (ACCPCM).
- c. Kesepakatan seluruh anggota Aseanapol untuk mendirikan Sekretariat Aseanapol di Malaysia, guna meningkatkan kerja sama dan koordinasi di antara anggota Aseanapol dalam memerangi kejahatan lintas Negara di wilayah Asia Tenggara.

Beberapa hasil penting dari pertemuan bilateral yang diadakan selama konferensi adalah :

- a. Komitmen kepolisian negara-negara sahabat Jepang, Selandia Baru dan Korea Selatan, untuk memberikan bantuan kepada Polri, khususnya di dalam peningkatan kemampuan personel Polri dalam pencegahan dan penyidikan kejahatan lintas Negara.
- b. Kepolisian Malaysia menyatakan kesediaannya untuk :
 - Memberi perhatian terhadap penanganan trafficking in person, khususnya dalam penanganan TKI, ke

depan diharapkan tidak hanya TKI yang dijadikan sebagai korban dan tersangka, tapi juga para agen penyalur baik dari Indonesia maupun dari Malaysia sendiri dapat dikenakan sanksi hukum.

- Penanganan illegal logging dari Indonesia masuk ke wilayah Malaysia untuk mendapatkan penanganan secara hukum yang sama sebagaimana yang berlaku di masing-masing Negara.
- Pihak Kepolisian Diraja Malaysia meminta penanganan mobil curian dari Malaysia, yang masuk ke Indonesia dapat ditangani sesuai fakta di lapangan.

Ketiga hal tersebut akan ditindak-lanjuti dalam pertemuan bilateral dalam waktu tidak terlalu lama.

Menindak-lanjuti hasil-hasil yang disepakati dalam joint communiqué tersebut, Polri akan meningkatkan kemampuan dan kerjasama, serta koordinasi yang intensif baik ke dalam maupun ke luar instansi Polri.

Selain hasil konferensi Aseanapol ke- 28, Polri telah berhasil dalam mengikuti lomba menembak pria, golf pria dan seni budaya yang ditampilkan oleh para Polwan yang ikut menjadi delegasi Polri ke Konferensi Aseanapol ke-28 di Bandar Sri Begawan.***